



Dewan Minta Penundaan Sterilisasi Bong Suwung

JOGJA - Warga Bong Suwung, Ilagran, Gedongtengen, Jogja, kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Jogja kemarin (19/9). Dalam agenda ini, warga meminta agar legislatif dapat membantu penundaan surat peringatan (SP) sterilisasi.

Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mengatakan, pada audiensi itu pihaknya memandang harus ada aspek sosial kemanusiaan yang harus diperhatikan. Sebab, bagaimanapun juga warga Bong Suwung juga memiliki hak sebagai warga negara.

Oleh karena itu, dari hasil audiensi itu dewan akan bersurat kepada PT KAI agar dapat melakukan penundaan sterilisasi Bong Suwung. Sekaligus meminta agar ada mediasi ulang dengan melibatkan masyarakat, legislatif, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

"Surat kami kirimkan hari ini (kemarin, *Red*), saya sudah mendatangani," ujar Sinar saat ditemui kemarin (19/9).

Politisi Partai Gerindra ini menilai, adanya mediasi kembali harapannya warga dapat menyampaikan keinginan dan usulan. Sehingga kemudian ditemukan jalan tengah terkait proses sterilisasi di kawasan Stasiun Tugu itu.

Sinar pun menyebut, apabila warga Bong Suwung benar-benar diwadahi tentu hal nantinya juga dapat mengantisipasi adanya aksi lanjutan. Sebab, masyarakat akan mendapatkan keadilan, lalu proses penataan lancar. "Ketika

Ketika warga benar-benar dimanusiakan, saya rasa demo-demo mungkin tidak ada lagi,"



SINARBIYAT NUJANAT
 Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Jogja

ka warga benar-benar dimanusiakan, saya rasa demo-demo mungkin tidak ada lagi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Warga Bong Suwung Jati Nugroho mengaku sangat mengapresiasi langkah DPRD Kota Jogja menyurati PT KAI terkait penundaan revitalisasi. Sebab, sebelumnya warga sudah menerima SP2 revitalisasi.

Menurut Jati, dengan penundaan SP3 nantinya warga dapat memiliki waktu untuk berpikir terkait tahapan sterilisasi. Dia pun mendorong dalam proses sterilisasi Bong Suwung, PT KAI dapat lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.

"Kedatangan kami ke DPRD Kota, satu rasa kemanusiaan dan keadilan harus dipikirkan. Kedua, penundaan SP3," beber Jati. (*inu/laz/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005